

PENGARUH CANDU TERHADAP ASPEK SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI SAMBAS TAHUN 1909-1942

ARTIKEL PENELITIAN



**OLEH:
ARIS MUNANDAR
NIM. F1231151006**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2020**

PENGARUH CANDU TERHADAP ASPEK SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI SAMBAS TAHUN 1909-1942

Aris Munandar, Agus Sastrawan Noor, Andang Firmansyah
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan Pontianak
Email: arismunandar150797@gmail.com

Abstract

The research was titled "Opium Influence on socio-cultural aspects and ethnic Chinese economy in Sambas year 1909-1942". A common problem in this research is how opium influences the ethnic Chinese in Sambas in 1909-1942. The purpose of this research is to describe the opium influence of ethnic Chinese in Sambas in 1909-1942 in socio-cultural and economic aspects. The study uses historiography methods, namely Heutistics, source criticism, verification, and historiography. The approach used in the study was sociology, economics and politics. The results of this study showed that: (1) The opium trade was not separated from the coming of the Chinese to Sambas, the opening of the gold mine at Monterado and the trade route between West Borneo and Singapore; (2) Opium trade managed by the local government as well as during the Dutch East Indies, influenced the socio-cultural life of Chinese society, especially the disputes between Chinese society and Sultan Sambas and government Dutch Colonial Indies; (3) The government-run opium management system through the Regie system gives a large income to fill the colonial treasury. The Chinese smugglers also benefit from opium trading as there is no need to pay high taxes to the colonial government. However, the majority of Chinese consumers have a health loss that will also affect their economy.

Keywords: Opium influence, ethnic Chinese, Sambas

PENDAHULUAN

Atas undangan Sultan Sambas tahun 1740, etnis Tionghoa datang ke Borneo Barat pada tahun 1740 untuk mengelola pertambangan emas. Saat itu penduduk pribumi, selain belum memiliki keterampilan yang lebih dalam pertambangan, juga tidak menjadikan aktivitas mencari emas sebagai pekerjaan utama mereka. Pribumi lebih senang bertani, mengumpulkan hasil hutan, menangkap ikan, atau sekedar berburu. Hingga saat etnis Tionghoa yang melakukan penambangan, dengan teknologi dan keterampilan yang lebih dari penduduk pribumi, hasil emas yang didapatkan dari perut bumi Borneo Barat jauh lebih banyak (Mary Somers Heidhues, 2008:40).

Dibukanya tambang-tambang emas oleh sultan dan diusahakan oleh etnis Tionghoa mendatangkan kemakmuran untuk kedua pihak. Kedatangan etnis Tionghoa dengan kelompok-kelompok kecil awalnya untuk mencari pekerjaan dan penghidupan ternyata berhasil lewat pertambangan emas. Hal ini memotivasi kedatangan kelompok-kelompok etnis Tionghoa lain untuk datang ke Borneo Barat.

Kelompok-kelompok kecil pertama penambang emas mengorganisasi diri dan memilih sendiri pemimpin mereka serta membagi keuntungan hasil tambang kepada seluruh anggota kelompok. Kelompok-kelompok

seperti ini disebut kongsi. Bentuk usaha kelompok ini berkembang menjadi lebih besar.

Para pengusaha, pedagang, dan penambang menyatukan modal dan membagi keuntungan yang didapat kepada para anggotanya. Kongsi-kongsi pertambangan sadar perlunya berkonsolidasi hingga membentuk kelompok yang lebih besar untuk membantu mereka menghadapi alam.

Etnis Tionghoa menempati posisi yang unik dalam sejarah. Di dalam perekonomian kolonial, mereka memainkan peranan penting. Pajak kekayaan yang ditimpakan kepada etnis Tionghoa sangat berperan dalam mengisi kas kolonial (James R. Rush, 2012:13).

Mereka adalah pekerja keras yang bekerja di sektor pertambangan yang membutuhkan tenaga dan keahlian. Oleh karenanya mereka membutuhkan sarana rekreasi untuk melepas penat setelah bekerja. Terdapat tempat-tempat yang menjadi sarana hiburan bagi mereka seperti rumah judi dan restoran. Namun yang paling identik sebagai hiburan dan paling banyak ditemukan di Monterado adalah rumah candu yang pelanggannya kebanyakan adalah para penambang, etnis Tionghoa lainnya dan beberapa etnis pribumi (Mary Somers Heidhues, 2008:181).

Awalnya, sebelum kedatangan dan perjanjian dagang dengan pemerintah Hindia Belanda, perdagangan candu dikuasai penuh oleh Kesultanan Sambas. Setelah adanya intervensi pemerintah Hindia Belanda melalui perjanjian dagang yang dimulai pada 3 Februari 1819 merubah sistem perniagaan di Sambas. Perdagangan pada umumnya menjadi kewenangan pemerintah kolonial yang dikelola dengan sistem *pacht*. *Pacht* candu ini dijual dengan cara dilelang. Pemegang *pacht* candu adalah para pedagang perantara. *Pacht* candu selain mengontrol peredaran candu di masyarakat, juga memberikan banyak keuntungan yang menghidupi pemerintahan Hindia Belanda dan kerajaan-kerajaan lokal.

Keuntungan *pacht* candu juga merupakan salah satu pemasukan yang digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk membiayai ekspansi ke wilayah-wilayah Nusantara. *Pacht* candu menjadi salah satu sumber penghasilan utama yang mengisi kas kolonial (Mary Somers Heidhues, 2008:185).

Candu atau opium sendiri dihasilkan dari bunga opium (*papaver somniferum*) yang tidak

dapat ditanam di iklim tropis seperti Hindia Belanda. Perlu iklim dan ketinggian tanah yang sesuai dengan di pegunungan kawasan subtropis. Opium ini ditanam di Turki, Persia dan India. Opium yang dikonsumsi di Borneo Barat masa itu diperoleh dari Singapura yang merupakan pelabuhan bebas.

Sebenarnya ada dilema yang dialami oleh pemerintah Hindia Belanda antara melarang atau melegalkan perdagangan candu. Melihat dampak buruk secara fisik dan moral membuatnya harus dilarang. Tetapi di sisi lain keuntungan yang besar menjadikan candu barang dagang yang penting. *Pacht* candu adalah cara yang digunakan untuk mengontrol peredaran candu di masyarakat. *Pacht* candu bahkan oleh sejumlah asisten residen disebut sebagai dasar dari *pacht* komoditas lain (Dana Listiana, 2017:132).

Namun pada masa jayanya, candu merupakan komoditas penting di pertambangan dan *pacht* candu menjadi salah satu pemasukan terbesar untuk kas kolonial. Tidak hanya itu, Seringkali para pemegang *pacht* candu melakukan penyelundupan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sehingga melahirkan konflik antara etnis Tionghoa dan pemerintah Hindia Belanda.

Sejak tahun 1824 sampai 1828, *pacht* candu masih dikelola oleh Sultan Sambas, di bawah Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I untuk seluruh keresidenan Borneo Barat. Tahun 1828-1852, *pacht* candu dipegang oleh Sultan Syarif Usman Alkadri dari Kesultanan Pontianak. Sebenarnya sejak awal 1824, pemerintah kolonial sudah hendak menjual *pacht* candu ini kepada pedagang Tionghoa. Namun saat itu belum ada yang tertarik. Baru pada tahun 1852, *pacht* yang dipegang oleh Sultan dicabut dengan alasan berjalan kurang efektif. Lalu dialihkan ke saudagar Tionghoa (Dana Listiana, 2017).

Candu yang awalnya sebagai sarana rekreasi. Lama-kelamaan di komunitas kongsi, candu menjadi komoditas penting. Namun situasi ini berubah mulai pada pertengahan abad ke-19 saat terjadi penurunan pendapatan *pacht* candu. Penurunan pendapatan *pacht* candu menandakan konsumsi candu yang menurun. Hal ini disebabkan oleh kemunduran pertambangan, perang kongsi dan penghapusan *pacht* candu tahun 1909.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik melihat bagaimana pengaruh candu terhadap etnis Tionghoa di Sambas setelah

penghapusan *pacht* pada tahun 1909 sampai akhir masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1943 pada kelompok Tionghoa di Sambas. Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan candu setelah dihapuskannya *pacht* candu. Peneliti melihat kajian sejarah lokal ini belum banyak diteliti, terlebih lagi yang membahas khusus mengenai sisi lain dari etnis Tionghoa di Kalimantan Barat pada periode paruh pertama abad ke-20. Oleh karena itu besar harapan agar penelitian ini bisa menambah wawasan pembaca maupun dijadikan referensi untuk mengerjakan tugas dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metodologi penelitian sejarah yang digunakan untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Menurut Louis Gottschalk (2015), tahapan penelitian sejarah ada 4, yaitu, (a) heuristik, yang merupakan upaya mencari atau menemukan sumber dan bukti sejarah. Tanpa tersedianya sumber-sumber dan bukti-bukti sejarah, mustahil untuk melakukan rekonstruksi masa lampau. Sumber sejarah disebut juga dengan data sejarah. Data-data yang dikumpulkan juga harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 2005:95). (b) Kritik Sumber, yaitu tahap menguji validasi sumber. Uji validasi sumber sejarah inilah yang dalam penelitian sejarah lebih dikenal sebagai kritik (verifikasi) sumber-sumber sejarah (Daliman, 2015:65). Verifikasi dua macam, yaitu autentisitas yang juga biasa disebut kritik ekstern dan kredibilitas atau kritik intern. Autentisitas atau kritik ekstern ini melihat keaslian sumber dari luar. Tahap kedua adalah melihat apakah sumber kita bisa dipercaya berdasarkan nilai yang terkandung dalam isi sumber (Kuntowijoyo, 2005:100-101). (c) Interpretasi, yang berarti tahap menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*fact*) atau bukti-bukti sejarah (*evidences*). Interpretasi diperlukan guna mengungkap makna dan signifikansi fakta dan bukti sejarah, karena sejatinya fakta dan bukti sejarah adalah saksi bisu. Saksi itu tidak akan bicara tanpa diinterpretasikan (Daliman, 2015:81), dan yang terakhir ada (d) Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah yang menjadi sarana mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi. Kalau penelitian sejarah bertugas merekonstruksi sejarah masa lampau, maka

rekonstruksi itu hanya akan ada dan berkembang apabila hasil-hasil pendirian itu ditulis (Daliman, 2015:98-99).

Selain metodologi, juga diperlukan pendekatan yang menentukan sudut pandang mana yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan. Pendekatan sejarah akan menjelaskan dari segi mana penelitian sejarah yang akan dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang akan diungkapkan, dan sebagainya (Sartono Kartodirdjo, 2016:4). Oleh karenanya, penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu sosiologi, ekonomi dan politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil

Pola Perdagangan Candu

James R. Rush (2012:1) mengatakan, “candu dipasok ke setiap koloni Eropa dan kawasan sekitarnya serta dijual kepada pembeli-pembeli Asia yang menjadi jajahan Prancis, Inggris dan Spanyol melalui melalui sistem tataniaga atau lainnya.” Kalimat itu menandakan bahwa komoditas candu memiliki arti penting bagi pemerintahan kolonial. Namun ketika orang-orang Belanda mendarat ke Nusantara pada abad ke-16, candu sudah menjadi komoditi penting dalam perdagangan regional. Awalnya candu diperdagangkan oleh orang-orang Arab.

Kehadiran imigran Tionghoa di pusat-pusat pertambangan yang membentuk kelompok juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan untuk menjalani kehidupannya. Candu menjadi salah satu kebutuhan di komunitas pertambangan.

Semakin meluasnya konsumsi candu, membuat pemerintah Hindia Belanda menerapkan sebuah sistem yang mempermudah kontrol dan manajemen dari komoditas candu, atau sistem tata niaga yang disebut Rush di paragraf awal. Namun Belanda memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola secara langsung komoditas ini dan banyak komoditas lain. Lalu candu dikelola dengan menggunakan sistem *pacht* atau di Indonesia populer dengan sebutan “pak”. *Pacht* candu adalah kesepakatan monopoli atas penjualan candu. Monopoli ini diberikan oleh negara kepada mereka yang bermufakat dengan negara untuk menjual candu. Orang yang memegang pak candu disebut *pachter* atau pengepak (James R. Rush, 2012:1).

Sistem ini membuat seseorang yang memiliki izin dari pemerintah, bisa menjual candu di suatu tempat dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan orang yang tidak memiliki izin dari pemerintah, dianggap sebagai kejahatan karena menyelundupkan barang tanpa izin. Secara teori, sistem ini akan menjadi pengontrol, baik jumlah maupun harga candu yang beredar di masyarakat. Semakin sedikit candu yang beredar, semakin mahal harganya di masyarakat. Hal itu bisa meningkatkan harga candu dan menekan konsumsinya di masyarakat. Namun praktiknya tidak demikian.

Rush (2012:69) mengatakan ada tiga sumber utama penyedia candu bagi Hindia Belanda, yaitu pedagang swasta Belanda di Levant, pelelangan di Calcuta, dan agen-agen di pelabuhan di Singapura yang dimiliki Inggris. Namun untuk wilayah Pantai Barat Borneo, yang paling dekat dan masuk akal adalah yang berasal dari Pelabuhan Singapura.

Sistem *pacht* diberikan melalui sistem lelang yang dipimpin oleh seorang residen. Pelelangan *pacht* candu diadakan di kediaman bupati senior. Di sanalah berkumpul semua pembesar keresidenan, mulai dari para bupati dan pejabat priyayi rendah, pejabat-pejabat Tionghoa dan anggota pegawai Hindia Belanda. Kehadiran seorang residen penting di sini untuk menjadi wakil dari pemerintah Hindia Belanda (James R. Rush, 2012:45-46).

Lalu seorang juru tulis akan membacakan syarat-syarat kompetisi, menentukan batas-batas wilayah kekuasaan *pachter*, kuota candu yang boleh diedarkan, dan jumlah kios-kios candu yang tersedia di wilayah tersebut. Lalu juru tulis dari awal memperingatkan dalam proses lelang, tidak boleh ada kecurangan, penyuapan dan penipuan (James R. Rush, 2012:45-46).

Semua pihak, baik pemerintah maupun calon *pachter*, memiliki pertaruhan sendiri di sini. Dari sisi pemerintah, penawaran yang tinggi terhadap *pacht* berarti sumbangan yang besar untuk kas kolonial. Selain itu, *pacht* candu dijadikan parameter kemakmuran di suatu daerah. Oleh karena itu, tinggi rendahnya nilai lelang *pacht* candu menunjukkan tingkat kemakmuran di daerah itu. Sedangkan bagi calon *pachter*, yang biasa diperebutkan oleh orang-orang Tionghoa dan saudagar-saudagar lokal, ini seperti “perang raja-raja”. Maksudnya perang untuk menguasai ekonomi dari candu. Namun *pacht* candu tidak hanya bicara tentang

keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang patronasi dan kewibawaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terjadinya kompetisi untuk meningkatkan nilai lelang dengan memberi keistimewaan kepada calon *pachter*, mulai dari transportasi gratis sampai suguhan mewah di pelelangan (James R. Rush, 2012:45-46).

Biasanya yang memenangkan lelang adalah orang-orang Tionghoa. Karena mereka lebih unggul dalam menggunakan banyak cara untuk mendapatkannya seperti penyuapan, penggalangan dengan beberapa kongsi Tionghoa lainnya, atau mencari dukungan dari residen atau pejabat-pejabat Belanda (Julianto Ibrahim, 2013:1-2). Mereka juga berani membayar mahal untuk menjadi *pachter* candu. Selain itu mereka punya semacam kongsi atau persekutuan bersama untuk mengumpulkan modal dan mengelola *pacht* candu ini.

Pada tahun 1880-an, kongsi-kongsi besar *pacht* candu mengalami keruntuhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penyelundupan yang merugikan para *pachter*. Bayangkan saja, *pachter* harus mengeluarkan banyak modal untuk mendapatkan *pacht* candu di lelang. Untuk mengembalikan modalnya dan mendapatkan keuntungan, ia harus menjual candunya dengan harga yang mahal. Sedangkan penyelundup tidak perlu membayar pajak untuk candu yang diedarkannya. Oleh karena itu dia bisa menjual candu dengan harga yang lebih murah dari yang dijual secara resmi.

Sistem *pacht* candu yang secara moral berfungsi untuk membatasi peredaran candu di tengah masyarakat dan dengan sistem monopoli ini membuat candu sulit didapatkan dan harganya mahal, dengan adanya penyelundupan malah terjadi sebaliknya. Hal ini menuai kritik dan memunculkan gerakan anti *pacht* candu yang menganggap sistem ini tidak lagi sesuai untuk mengelola candu. Para pengkritik datang dari kalangan jurnalis, misionaris, beberapa politisi Belanda dan pegawai-pegawai kolonial. Ada beberapa pihak juga yang selain mengkritik sistem *pacht*, juga menentang konsumsi candu yang berdampak buruk pada masyarakat.

Sistem *pacht* membuat pemerintah Hindia Belanda harus menyerahkan kekuasaan kepada *pachter*. Sistem semiotonom seperti itu dinilai merongrong kewibawaan pemerintah dan menjadikan orang Tionghoa berpengaruh dan berkuasa di daerah-daerah dari *pacht* yang

dikuasainya. Pemerintah Hindia Belanda tidak mau *imperium in imperio*-nya menjadi terganggu.

Candu dan Kehidupan Sosial Etnis Tionghoa

Migrasi besar orang Tionghoa yang paling awal tercatat adalah pada tahun 1740. Saat Sultan Sambas mendengar keahlian orang Tionghoa dalam mengelola tambang emas dan dapat menghasilkan emas lebih banyak dari teknologi yang sudah ada sebelumnya yang digunakan oleh orang-orang Dayak. Lalu diundanglah mereka untuk menambang. Kemungkinan pertambangan pertama berada di daerah sepanjang Sungai Duri, yang menjadi perbatasan antara Kesultanan Sambas dan Panembahan Mempawah (Mary Somers Heidhues, 2008:40).

Namun orang Tionghoa yang datang harus dibebani dengan berbagai tuntutan oleh Sultan Sambas. Selain membayar sewa tambang, orang-orang Tionghoa juga diharuskan untuk membayar pajak kepala kepada Sultan Sambas, Abubakar Tajudin I. Pajak kepala adalah pajak yang ditimpakan kepada setiap individu orang Tionghoa kecuali anak di bawah 6 tahun, orang cacat atau orang tua dengan membayar satu gulden pertahun (S.H. Shaank, 2015:104).

Sultan Sambas juga memonopoli perdagangan, mulai dari kebutuhan pokok, candu, garam tembakau dan lain-lain untuk pemukim Tionghoa di pertambangan. Orang Tionghoa dilarang bercocok tanam, agar Sultan Sambas tetap mendapat keuntungan dari perdagangan. Sultan sambas menjual kebutuhan pokok dengan harga tinggi.

Karena merasa keberatan dengan segala kebijakan sultan, orang Tionghoa mulai mencari alternatif kerjasama lain. Mereka menghubungi Inggris di Semenanjung Malaka. Pada bulan Februari 1834, sebuah laporan telah dibawa ke Singapura bahwa orang-orang dari sebuah koloni Tionghoa di Borneo Barat ingin sekali membangun hubungan komersial permanen dengan Pemukiman Inggris (Victor Purcell, 1951:492).

Sultan merasa kedaulatannya terancam. Saat sultan ingin menegakkan lagi kekuasaannya atas orang Tionghoa, ia menyadari kalau orang Tionghoa sudah terlalu kuat. Lalu Sultan Muhammad Ali Syafiuddin II mengundang pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk datang ke Sambas dan membantu mengembalikan kewibawaannya terhadap orang

Tionghoa. Akhirnya Hindia Belanda datang ke Sambas dan menancapkan benderanya pada tahun 1818.

Di kalangan orang Tionghoa, khususnya Khek terdapat sebuah stratifikasi sosial di dalam masyarakatnya, termasuklah orang-orang Khek yang ada di Distrik Tionghoa di Sambas. Perbedaan status sosial ini berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh individunya. Sebelum pergi merantau, memiliki keahlian adalah syarat mutlak bagi orang Khek. Hal ini sebagai modal untuk bertahan hidup di perantauan nanti. Jika di dalam komunitas pertambangan atau kongsi, yang menempati strata tertinggi justru yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kerja tambang. Melainkan para ahli yang menunjang kehidupan di komunitas pertambangan. Ada tujuh pekerjaan yang menempati kasta tertinggi di dalam kehidupan orang-orang Khek, yaitu tukang besi, tukang kayu, tukang jahit, tukang obat, tukang cukur, tukang emas dan tukang masak.

Sedangkan untuk strata terendah diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus dan “hanya” mengandalkan tenaga seperti pertanian dan pertambangan. Strata terendah yang tidak memerlukan keahlian khusus ini cenderung bisa dilakukan oleh siapapun. Namun bukan berarti perannya tidak penting, karena mereka adalah jantung kehidupan kongsi. Konsumen terbesar candu berasal dari strata terendah ini, khususnya penambang. Orang Tionghoa terkenal sebagai pekerja keras. Setelah mereka mengurus tenaga di pertambangan, mereka menghibur diri mereka dengan menghisap candu. Selain itu para penambang dominan diisi oleh bujangan yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Mereka cenderung tidak memiliki tanggungan lebih dibanding orang-orang Tionghoa yang berkeluarga. Kadang mereka hanya menyisihkan uangnya untuk kepulangan ke Tiongkok, atau membiayai keluarganya yang ada di Tiongkok untuk datang ke Pantai Barat Borneo. Seperti yang digambarkan Mary Somers Heidhues (2008:61) terkait cara penambang dalam membelanjakan pendapatannya. “Pada umumnya para buruh Tionghoa menghabiskan uangnya untuk membeli makanan enak, berjudi dan menghisap candu...”

Di Perang Kongsi yang pertama, Hindia Belanda gagal menaklukkan kongsi. Namun di Perang Kongsi yang kedua akibat konflik 2 kongsi besar, yaitu Thaikong dan Samtiaokioe,

Hindia Belanda merasa ini adalah cara untuk menaklukkan kongsi. Masalah penyelundupan menjadi alasan. Pada Mei 1850, sebuah perahu kecil dengan penuh muatan candu, garam dan serbuk mesiu memasuki Sungai Sedau yang menjadi rute utama jalur transportasi gelap menuju Monterado. Perang Kongsi yang kedua pada tahun 1850 menyebabkan dibubarkannya kongsi tiga tahun berikutnya.

Perubahan yang paling terasa adalah pembubaran kongsi yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 membuat masyarakat Tionghoa tidak bisa mengorganisasi diri dalam mengelola pertambangan.

Inilah awal mula dari sistem baru dalam pemerintahan di komunitas Tionghoa. Mereka tidak lagi secara langsung memilih pemimpin mereka, melainkan oleh Belanda yang dalam tugas sehari-harinya mengangkat *kapthai* (kapiten besar) dan *lothai* untuk memimpin orang Tionghoa. Namun para pemimpin baru ini dipilih dan tunduk di bawah asisten residen Sambas. Ini akan berpengaruh kepada pengelolaan candu dan selanjutnya pada kehidupan sosial-budaya orang-orang Tionghoa di Sambas (Mary Somers Heidhues, 2008:92).

Perubahan dalam kehidupan sosial Tionghoa yang terjadi karena dihapuskannya kongsi juga diikuti oleh rencana Willer untuk merorganisasi pengelolaan candu. Ia menginginkan agar candu dikelola oleh Opsir Tionghoa. Ini sebagai salah satu cara pemerintah untuk membiayai opsir-opsir tionghoa di bekas wilayah kongsi. Cara ini juga menjadi cara yang paling efektif untuk menekan penyelundupan. Karena penyelundupan dilakukan oleh komunitas kongsi dan jika *pacht* candu dipegang oleh orang dari golongannya, besar kemungkinan penyelundupan akan berkurang (Dana Listiana, 2017:195).

Pada Juni 1851 Residen Willer telah mengangkat seorang *Regent* atau pemimpin untuk Fasjoen. Regent itu adalah Tjang Ping. Namun ia adalah pemimpin yang tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota Fasjoen. Willer menawarkan *pacht* candu kepada Tjang Ping agar dapat membayar denda yang ditimpakan oleh pemerintah akibat perang yang terjadi di Pemangkat pada tahun 1850. Tjang Ping setuju dengan tawaran itu. Meskipun Tjang Ping adalah pemimpin yang dipilih oleh Belanda, namun sistem-sistem demokratis tetap dipertahankan dalam kongsi. Tjang Ping mengumpulkan

anggota Thaikong pada Desember 1852 untuk membicarakan usulan Willer. Rapat itu dihadiri sekitar seribu orang. Mayoritas dihadiri oleh penambang, sekitar 10 persen. Sedangkan sisanya adalah petani dan pedagang. Mereka tahu bahwa tawaran Willer memberikan kerugian pada konsumen candu. Karena mereka tahu, jika *pacht* candu sudah diberikan kepada mereka, penyelundupan akan ditekan. Itu berakibat pada meningkatnya harga candu. Mereka juga menganggap Tjang Ping adalah boneka Belanda (Mary Somers Heidhues, 2008:90).

Residen Willer pernah menawarkan *pacht* candu kepada Thaikong, namun ditolak oleh anggota Thaikong sendiri. Namun ada kongsi besar di selatan yang terkenal kooperatif dengan pemerintah Belanda. Kongsi itu adalah Lanfang di Mandor. Sikap dan sifat kongsi terhadap pemerintah Belanda inilah yang menjadi kunci panjang umur kongsi Lanfang dibanding kongsi-kongsi lain, meskipun dengan pemerintahan yang tidak merdeka. Berbeda dengan Thaikong yang selalu ingin mempertahankan “kemerdekaannya” dan selalu membangkang dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemimpinnya saat itu, Lioe A Sin bersama dengan koleganya yaitu Eng Tjong Kwe dan Then Sioe Ling. Merekalah yang berani membeli *pacht* candu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan Willer kepada Thaikong. Tidak ada kekhawiran dari Lioe A Sin akan mendapat penolakan dari anggotanya karena kongsi ini dinilai kooperatif dengan pemerintah. Mulai pada tahun 1853, *pacht* candu dipegang oleh Lioe A Sin dan koleganya (Mary Somers Heidhues, 2008:92).

Koloniaal Verslag tahun 1856 menyatakan bahwa bekas anggota kongsi di Lumar yang tidak puas dengan hilangnya kemerdekaan mereka, membuat onar dan mengacaukan keamanan di sana. Setelah kongsi hancur, banyak pula pekerja tambang yang meninggalkan daerahnya. Kedatangan orang Tionghoa ke Kalimantan juga merosot (De Groot, 2014:162).

Untuk mengganti sistem birokrasi kongsi, pemerintah kolonial membentuk struktur baru yang dipimpin oleh kapitan, lothai dan kaptjong. Kapitan dan strukturalnya mulai efektif diberlakukan sejak kongsi dibubarkan. Kapitan, lothai dan kaptjong diberlakukan untuk mengganti sistem pemerintahan masa kongsi. Jumlah kapitan di Borneo Barat seiring waktu mengalami pasang surut tergantung kemampuan ekonomi pemerintah kolonial Hindia Belanda di

Borneo Barat. Karena meskipun pada masa awal beberapa kapitan tidak digaji, namun lama kelamaan posisi ini sepi peminat. Oleh karenanya pemerintah menawarkan gaji agar ada yang ingin mengisi posisi ini. Namun dengan resiko pengeluaran yang besar. Pemerintah pada abad ke-20, mengurangi jumlah kapitan. Tahun 1925, ada 14 kapitan Tionghoa di Borneo Barat. Sedangkan tahun 1930, hanya tersisa 3 kapitan yang berada di Singkawang, Pemangkat dan Monterado. Ada 16 lothai dan 12 kaptjong yang menyebar di wilayah-wilayah itu (Mary Somers Heidhues, 2008:184).

Munculnya gelombang nasionalisme di Tiongkok pada dekade pertama abad ke-20 di Tiongkok tidak hanya berpengaruh pada orang-orang Tionghoa yang berada di Tiongkok, namun juga orang-orang Tionghoa yang sudah merantau keluar dari negerinya. Termasuklah orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia dan masih bersimpati terhadap Tiongkok. Ada keinginan untuk menunjukkan harga diri orang Tionghoa di tanah perantauan. Konsumsi candu adalah aib bagi orang-orang Tionghoa golongan ini. Oleh karena itulah mereka melakukan kampanye anti-candu untuk membebaskan orang Tionghoa dari kebiasaan mengonsumsi candu.

Namun gerakan itu juga tak benar-benar berhasil menghilangkan candu dari kehidupan sosial masyarakat Tionghoa. Terjadi kasus yang melibatkan seorang Lothai di Pontianak bernama Lim Boen Tek pada 29 Mei 1923. Ia ditugaskan untuk menarik *belasting* (pajak). Namun saat ia menyerahkan uang itu kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, nilainya kurang daripada yang seharusnya. Ia dianggap lalai dalam mengelola pajak. Akibatnya ia dipenjara oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berkurangnya uang pajak itu disebabkan oleh ulah Lim Boen Tek yang menggunakannya untuk membeli candu. Pada masa awal ia diangkat menjadi lothai untuk menggantikan ayahnya, ia memang merupakan seorang pecandu. Oleh karena itu keredaksian koran Halilintar masa itu menyalahkan pemerintah yang menyerahkan urusan uang kepada seorang penghisap candu yang berakibat pada korupsi uang pajak untuk membeli candu (Halilintar, 14 Juli 1923).

XF Asali saat diwawancarai pada 17 November 2019 lalu mengatakan bahwa sejarah tentang dampak buruk candu seperti ketergantungan sampai mengurang angka harapan hidup itulah yang membuat orang

Tionghoa belajar meninggalkan candu secara perlahan. Mereka menjauhi komoditas yang dianggap aib sejarah bagi golongan mereka, sampai hal-hal lain yang dekat dengan komoditas itu.

Candu dan Kehidupan Perekonomian Masyarakat Tionghoa.

Di sepanjang abad ke-19, candu menjadi komoditas penting di pertambangan. Pacht candu bisa digolongkan sebagai pajak tidak langsung atau belasting indirect (Dana Listiana, 2017:189).

Pachter candu yang terkenal di Borneo Barat adalah Kwe Hoe Toan. Ia merupakan etnis Tionghoa dari golongan Hokkien, golongan minoritas di antara etnis Tionghoa yang ada di Borneo Barat. Lalu ada Ho A Joen, yang berasal dari Belitung. Ada pula Then Sieo Lin, yang merupakan kolega dari Kapitan Tionghoa di Mandor, Lioe A Sin. Mereka bekerjasama mengelola pacht candu di Borneo Barat (Mary Somers Heidhues, 2008:178-181).

Berakhirnya kongsi Thaikong dan sekutunya juga menandakan berakhirnya kejayaan pertambangan emas di Monterado dan sekitarnya. Hal itu mengaibatkan menurunnya jumlah konsumen candu dan diikuti oleh menurunnya keuntungan yang diperoleh pachter candu. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Nilai Pacht candu Di Borneo Barat

Tahun	Nilai Pacht
Sebelum 1850	f 400.000
1865	f 261.000
1874	f 96.000
1890	f 100.000
1891	f 98.400

Sumber: Heidhues (2008:181-182)

Pemerintah Hindia Hindia Belanda di Batavia mengambil kebijakan penting dalam pengelolaan candu pada tahun 1896. Mereka mengganti sistem pengelolaan candu yang dulunya menggunakan sistem pacht menjadi sistem *regie*. Ada tiga alasan penggantian sistem *pacht*, yaitu menguatnya administrasi kolonial, meningkatnya jumlah pegawai, dan munculnya elit-elit Tionghoa yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang membentuk negara di dalam negara (Dana Listiana, 2017:184-185). Namun khusus di Borneo Barat, alasan utamanya

adalah berkurangnya konsumen candu yang membuat penyerapan pajak dari *pacht* candu menjadi kecil.

Regie candu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Candu yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah akan memberikan pemasukan besar pada kas kolonial. Lebih besar dibandingkan dengan sistem *pacht* yang sebagian besar keuntungan lari kepada pengelola *pacht*, yaitu *pachter-pachter* Tionghoa. Di bawah *regie* candu, semua urusan candu dipusatkan di ibukota. Pabrik-pabrik candu di daerah-daerah yang pada masa *pacht* yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa tidak diperbolehkan lagi. Sebagai ganti dari *pacht* dan sub-*pacht* setempat beserta organisasinya, sebuah birokrasi candu diwakili oleh pegawai kolonial setempat. Di bawah *regie* candu setiap keresidenan memiliki pusat depot candu yang dikelola oleh pemegang depot Eropa dan jaringan kerja luas yang terdiri atas toko-toko *pacht* legal pada masa sebelumnya. Toko *Regie* candu ditangani oleh para pribumi yang bertanggung jawab penuh atas perdagangan eceran setempat, menjual kepada pelanggan, mencatat transaksi harian, dan menyerahkan hasil penjualan dalam bentuk tunai kepada orang yang dipercaya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menjadi seorang kolektor. Kolektor ini berperan sebagai pengumpul hasil-hasil penjualan candu di tiap-tiap keresidenan atau *afdeling*. Semua toko candu di masa *regie* harus berlisensi yang menandakan bahwa mereka adalah penjual candu resmi, bukan ilegal (James R. Rush, 2012:230-233).

Pada tahun 30 Maret 1909, menjadi akhir dari periode *pacht* candu terakhir dan menandai berakhirnya sistem tersebut. Penghapusan sistem *pacht* di Kalimantan Barat terjadi setelah kebijakan serupa sudah diterapkan oleh pemerintah pusat selama 13 tahun sebelumnya, yaitu 1896 (Dana Listiana, 2017:136).

Total pendapatan pemerintah kolonial Hindia Belanda dari tahun 1920-1933 berjumlah 513 juta guden. Setidaknya itu bisa menjawab kenapa pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan standar ganda dalam kebijakan politiknya perihal candu. Di satu sisi mereka berkeinginan untuk membangun negara kolonial yang beradab dan melepaskan penduduk di negara koloninya dari candu. Tapi di sisi lain mereka mempertahankan bisnis candu demi

keuntungan yang digunakan untuk mengisi kas negara.

Akibat pembubaran Kongsi pada tahun 1853, distrik-distrik Tionghoa yang berada di Sambas yang dulunya adalah bekas kongsi pertambangan yang sebelumnya begitu maju, tidak lagi dihuni dan hanya meninggalkan sedikit aktivitas pertambangan. Yang tersisa hanyalah kemiskinan dan serba kekurangan.

Namun, mulai pada tahun 1885 terbilang sebagai masa yang relatif damai di Borneo Barat. Pada masa ini orang Tionghoa berusaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat perang kongsi dan mulai memulihkan diri secara bertahap serta menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa kongsi. H.J. Kloos yang datang ke Borneo Barat pada tahun 1866, mengamati bahwa dimanapun orang Tionghoa berada, ia mengubah daratan liar menjadi ladang padi yang subur serta membangun jalan untuk mengangkut hasil alam. Bekas penambang pada akhir abad ke-19 mulai memperbaiki kehidupannya dengan beralih menjadi petani dan membuka ladang-ladang baru (Mary Somers Heidhues, 2008:131).

Lahan pertanian orang Tionghoa terpusat di sepanjang pesisir, mulai dari Pontianak menuju ke Sambas, termasuk daerah distrik Tionghoa di Monterado dan Bengkayang. Pertanian yang berada di Singkawang dan Pemangkat semakin ramai. Mulai banyak tanaman-tanaman baru yang berasal dari Tiongkok yang sebelumnya jarang ditanam di Borneo Barat, sekarang sudah ramai ditanam oleh orang-orang Tionghoa. Sawah-sawah orang Tionghoa menerapkan sistem tadah hujan. Sawah-sawah itu memberikan hasil yang baik untuk mencukupi kebutuhannya. Sebagian dari hasil pertanian itu dijual. Selain itu mereka juga mengenalkan teknologi-teknologi pertanian sederhana yang berasal dari Tiongkok. Alat-alat tersebut seperti penumbuk padi dan penggiling tebu. Saat itu pribumi menggunakan teknologi yang lebih sederhana dari yang digunakan orang-orang Tionghoa. Lama-kelamaan teknologi dan tata cara pertanian, serta varietas pertanian dan perkebunan baru yang dibawa oleh orang Tionghoa ditiru oleh petani-petani lain (Mary Somers Heidhues, 2008:158).

Selain pertanian, mereka juga beralih ke perdagangan. Sudah sejak lama orang-orang Tionghoa dikenal perannya dalam bidang ekonomi, khususnya pedagang perantara yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir Borneo Barat. Secara keseluruhan perdagangan

di Borneo Barat dikuasai oleh orang Tionghoa, baik perdagangan besar maupun perdagangan kecil. Orang Tionghoa yang masih menetap di pedalaman, mengenal penduduk di sana dan tahu kebutuhan mereka. Hal itu dimanfaatkan oleh orang Tionghoa untuk berdagang. Orang-orang Tionghoa menggantikan posisi penguasa lokal dan para bangsawan Melayu sebagai pemasok berbagai kebutuhan untuk orang Dayak.

Pedagang perantara mempunyai dua tugas, yaitu distributor dan pengumpul. Tugas distributor adalah menyalurkan barang kebutuhan masyarakat pedalaman, seperti garam, tembakau, candu, ikan asin, minyak, kain dan barang-barang dari besi. Sedangkan pengumpul bertugas untuk memborong hasil produksi masyarakat di pedalaman, baik itu hasil hutan ataupun hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, damar, kayu, rotan, kopi, fula aren, tengkawang dan lain-lain. Orang-orang Tionghoa juga menjadi eksportir dan menjalin hubungan dagang yang erat dengan pedagang-pedagang Asia lainnya seperti Malaya, Singapura, Hongkong dan Macau yang merupakan kota-kota dagang internasional (Any Rahmayani dan Ina Mirawati, 2015:87).

Hubungan perdagangan orang Tionghoa dengan penduduk di pedalaman biasanya menggunakan barter. Mereka juga berbaik hati untuk memperbolehkan penduduk di pedalaman. Oleh karenanya, pedagang Tionghoa lebih diminati oleh orang-orang di pedalaman dibandingkan dengan pedagang-pedagang lain. Namun pedagang-pedagang Tionghoa membentuk sebuah ikatan yang membuat orang-orang Dayak di pedalaman tergantung kepada mereka. Selain karena memang kebutuhan, pedagang Tionghoa seringkali memberi pinjaman uang kepada orang Dayak dan membuat mereka tetap dalam kondisi tersebut agar ikatan yang dijalin lebih kuat (Mary Somers Heidhues, 2008:147).

Sistem barter membuat orang Tionghoa menjadi penghubung antara komoditas yang tidak bisa didapatkan di pedalaman seperti candu, garam, pakaian, perhiasan serta beras, dan ditukar dengan hasil hutan yang ada di pedalaman. Lama kelamaan, interaksi ini membentuk jaringan perdagangan hasil hutan untuk pasar internasional. Pada babak selanjutnya, perekonomian di Borneo Barat tidak hanya mengandalkan hasil hutan. Pada tahun 1915, tanaman niaga seperti karet dan kelapa

sudah banyak ditanam. Orang Tionghoa memelopori perdagangan karet dan kopra. Akibatnya, tanaman niaga itu makin banyak ditanam (Mary Somers Heidhues, 2008:133).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kelas sosial yang terbentuk pada etnis Tionghoa di Sambas pada masa kongsi, khususnya Khek, yang dibagi berdasarkan keahlian yang dimiliki, berpengaruh terhadap pola konsumsi candu. Konsumen candu paling banyak berasal dari kelas paling bawah, yaitu penambang. Selanjutnya persoalan candu juga menjadi awal konflik antar etnis Tionghoa, etnis Tionghoa dan Kesultanan Sambas, maupun etnis Tionghoa dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Rangkaian konflik ini mengakibatkan dibubarkannya kongsi tahun 1853 dan etnis Tionghoa mutlak di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun setelahnya konsumsi candu tidak benar-benar hilang. Candu menjadi aib bagi etnis Tionghoa karena dianggap sebagai budaya yang kolot dan merusak. Gerakan Nasionalisme yang muncul di Tiongkok pada dekade pertama abad ke-20 yang membawa semangat modernisasi kepada masyarakatnya, baik yang ada di Tiongkok maupun yang merantau, membuat candu menjadi salah satu fokus kampanye. Gerakan anti-candu menjadi marak di koran-koran yang digerakkan oleh orang-orang yang terpapar semangat Nasionalisme Tiongkok.

Kelompok yang menjadi penggerak ekonomi utama di Sambas adalah orang-orang Tionghoa, mulai dari tambang emas sampai pertanian dan perdagangan. Etnis Tionghoa di Sambas juga bisa dikatakan sebagai pemasukan utama pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sambas. Tidak ada hal lain yang menghubungkan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan orang Tionghoa selain urusan pajak. Candu berperan dalam merubah pola perekonomian di Borneo Barat di pertengahan abad ke-19. Konflik antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kongsi diawali oleh penyelundupan candu. Konflik yang berujung pembubaran kongsi itu membuat pertambangan ditinggalkan dan orang Tionghoa mulai membuka lahan pertanian. Selanjutnya berkembang perkebunan tanaman niaga secara massal. Perkembangan ini menjadikan Borneo Barat berfokus kepada perdagangan tanaman niaga dan ikut dalam arus perdagangan internasional.

Saran

Saran Di negara multikultur seperti Indonesia, punya rasa toleransi adalah sebuah keharusan. Karena, tanpa adanya toleransi, akan terjadi diskriminasi. Akibatnya, bisa terjadi pertikaian dan perpecahan. Cara awal paling ideal dalam bertoleransi adalah mengenal sejarah golongan-golongan, baik itu mayoritas atau minoritas. Dalam hal ini saya menggali sejarah Tionghoa di Sambas dari sisi candu. Namun masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, khususnya sumber primer. Oleh karenanya, besar harapan peneliti penelitian ini bisa dilanjutkan nantinya dengan sumber yang lebih kaya lagi.

DAFTAR RUJUKAN

Arsip

ANRI, West Borneo No. 83
ANRI, West Borneo, No. 84

Koran dan Majalah

Halilintar, 14 Juli 1923
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 9 Juni 1923
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 7 Juli 1923
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 4 Oktober 1924
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 12 November 1927
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 19 November 1927
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 24 Desember 1927
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 26 Mei 1928
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 11 Agustus 1928
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 8 Desember 1928
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 26 Oktober 1929
Sin Po, Wekelijksche-Editie, 23 Februari 1935

Skripsi, Tesis atau Disertasi

Dana Listiana. (2017). *Sistem Pacht dan Perluasan Negara Kolonialdi Pontianak 1819-1909*. (Tesis). Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Narti. (1998). *Perdagangan Candu di Jawa 1920-1930*. (Skripsi). Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Putra, I. B. (2000). *Tradisi Candu Masyarakat Bali 1839-1939*. (Skripsi). Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Internet

Abdul Anzis Nugroho. (2018). Perdagangan Opium di Karesidenan Jepara Tahun 1870-1932. *E-Journal Student Uny: Ilmu Sejarah* 3(3). Retrieved from [http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php](http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/p/ilmu-sejarah/article/download/12427/11974)

[p/ilmu-sejarah/article/download/12427/11974](http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/p/ilmu-sejarah/article/download/12427/11974).

Iswarta Bima Pangukir Ilham. (2012). Peran Etnis Tionghoa Dalam Perdagangan Opium Di Karesidenan Semarang Pada Tahun 1870-1896. *E-Prints UNY*. Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/8620/>.

Julianto Ibrahim. (2016). Candu dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan dalam Perdagangan Candu Di Jawa Pada Masa Revolusi. *Jurnal Kawistara*, 6 (1). Tersedia pada <https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/15495>.

Artikel Ilmiah

Neni Puji Nur Rahmawati. (2005). Petani Cina Di Kota Pontianak. *Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan*. (06). 58.
Poltak Johansen. (2003). Kebudayaan Cina: Makna Tradisi Imlek dan Cap Go Meh Di Pontianak. *Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan*. (02). 58

Buku

ANRI. (2005). *Perdagangan Candu Tahun 1830 Sampai Dengan Perang Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Any Aahmayani, Ina Mirawati. (2015). *Aktivitas Perdagangan Di Pelabuhan Sambas 1833-1930*. Yogyakarta: Kapel Press.
Carey, P. (2015). *Orang Tionghoa, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Tionghoa 1755-1825*. (Alih Bahasa: Wasmi Alhaziri). Depok: Komunitas Bambu.
Daliman, A. (2015). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
Enthoven, J.J.K. (1905). *Sejarah dan Geografi Daerah Sungai Kapuas*. (Alih Bahasa: P. Yeri, OFM, Cap). Pontianak: Institut Dayakologi.
Gottschalk, L. (2015). *Mengerti Sejarah*. (Alih Bahasa: Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.
Groot, De J.J.M.M. dan J.W. Young. (2015). *Sejarah Kongsi Lan-Fong Mandor: Kapthai Demang dari Mandor (Kapthai 1823-1837)*. (Alih Bahasa: P. Yeri OFM, Cap). Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Groot, J. D. (1885). *Sejarah Kongsi di Kalimantan Barat*. (Alih Bahasa: Ivan

- Taniputera). Bandung: Bina Manggala Widya.
- Heidhues, M. S. (2008). *Penambang Emas, Petani dan Pedagang di Distrik Tionghoa Kalimantan Barat*. (Alih Bahasa: Asep Salmin, Suma Miharja dkk). Jakarta: Yayasan Nabil.
- Irwin Graham. (1986). *Borneo Abad Kesembilanbelas*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Julianto Ibrahim. (2013). *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi 1945-1950*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, S. (2016). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirdjo, Sartono, Kuntowijoyo, Bambang Purwanto, dkk. (2016). *Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model dan Tantangannya*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Bentang.
- Lapian, A. B. (2017). *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu.
- Onghokham. (2017). *Migrasi Tionghoa, Kapitalisme Tionghoa dan Anti Tionghoa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prathama Rahadja, Mandala Manurung. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Priyadi, S. (2015). *Sejarah Lokal: Konsep, Metode dan Tantangan*. Yogyakarta: Ombak.
- Rahmayani, A. (2014). *Permukiman Orang Tionghoa di Singkawang: Dari Masa Kongsi Hingga Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Rahmayani, Ani dan Irfan Natarsa. (2017). *Aktivitas Niaga Antara Pontianak dan Singapura Tahun 1819-1942*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Rahmayani, Any dan Ina Mirawati. (2015). *Aktivitas Perdagangan di Pelabuhan Sambas 1833-1930*. Yogyakarta: Kapel Press.
- Rush, J. R. (2012). *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860-1910*. (Alih Bahasa: Tim Komunitas Bambu). Depok: Komunitas Bambu.
- Sandick, van. L. H. W. (1909). *Chineezzen Buiten China: Hunne Beteekenis voor de Ontwikkeling van Zuid-Oost-Azie, Speciaal van Nederlandsch-Indië*. Amsterdam: Firma J. F. Hock.
- Schaank, S.H. (2015). *Kongsi-Kongsi Montrado: Sumbangan Kepada Sejarah dan Pengetahuan dari Perkumpulan-Perkumpulan Orang Cina di Pantai Barat Borneo*. (Alih Bahasa: P. Yeri, OFM. Cap). Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suherman Rosyidi. (2012). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Taufik Abdullah, dkk. (2016). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Yogyakarta: Ombak.
- Tim Penulis. (2017). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Artikel Hasil Penelitian)*. Pontianak: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura.
- Van Rees, W. A. (2016). *Montrado: Pendudukan Orang Cina di Borneo*. (Alih Bahasa: P. Yeri OFM. Cap). Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Veth, P. (2017). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis Jilid I*. Terj. P. Yeri OFM, Cap. Pontianak: Institut Dayakologi.
- _____. (2017). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis Jilid II*. Terj. P. Yeri, OFM, Cap. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Victor Purcell. (1951). *Thee Chinese In Southeast Asia*. London: Oxford University Press.
- Ya' Achmad, dkk. (1982). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zheng Yangwen. (2005). *The Social Life of Opium in China*. Amerika Serikat: Cambridge University Press.